

MEMBANGUN KESADARAN KRITIS MELALUI PENDIDIKAN

Oleh Haryanto^{*)}

Abstrak

Pendidikan seharusnya menjadi variabel determinatif bagi variabel lain seperti kebudayaan, politik, ekonomi, filosofis, dan bahkan agama. Pemikiran ini terasa aneh, sebab yang kita pahami selama ini, justru pendidikan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebudayaan, politik, ekonomi, filsafat, dan agama. Hal ini terjadi karena praksis pendidikan kita selama ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor lain terutama faktor ekonomi dan politik. Pendidikan diselenggarakan bukan dalam rangka membangun system ekonomi yang adil dan berpihak pada yang lemah. Pendidikan masih sarat dengan kepentingan politik penguasa. Oleh sebab itu perlu ada upaya untuk membangun kesadaran kritis melalui pendidikan, agar pendidikan mampu menciptakan system ekonomi dan sistem politik yang adil dan berpihak pada yang lemah. Agar upaya itu terwujud, paradigma pendidikan *konservatif* dan paradigma pendidikan *liberal* harus ditinggalkan dan beralih pada paradigma pendidikan *kritis*. Paradigma pendidikan kritis ini merupakan sebuah upaya untuk membangun dan mengubah kesadaran masyarakat dari kesadaran *magis* dan kesadaran *naïf* menuju kesadaran *kritis*.

Kata Kunci: Kesadaran kritis

DEVELOPING THE CRITICAL AWARENESS THROUGH EDUCATION

By Haryanto

Abstract

Education should be determinative variable for another one such as culture, politics, economy, philosophy, and even religion. This thought is felt strange, because that we understand as long as this are exactly the education influenced by other factor such as culture, politics, economy, philosophy, and religion. It is occurred due to our educational practical at the time is really influenced by other factor mainly economical and political one. Education is performed not in the purpose to develop fair economical system and support to the lower. It is yet full of authorities' political interest. Therefore it is necessary to make an effort to develop the critical awareness through education, in order to be able to create a fair economical and political system and support to the lower. In order to make it real, the paradigm of *conservative* and *liberal* education must be left behind and turn to the paradigm of *critical* one. The latter is an effort to develop and change people's awareness of magical and naive awareness leads to the critical one.

Key Words: Critical awardness

^{*)} Dosen KTP FIP UNY

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting, strategis dan determinatif bagi masyarakat. Maju-mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat/bangsa sangat bergantung pada bagaimana kualitas pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang menyadari dan memahami makna strategisnya pendidikanlah yang mampu meraih kemajuan dan menguasai dunia. Bagaimana pun, pendidikan merupakan alat terefektif bagi perubahan dan pencapaian kemajuan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Dilihat dari perspektif kebudayaan, pendidikan merupakan upaya sivilisasi, enkulturisasi. Dari perspektif politik, pendidikan dipandang sebagai langkah untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) warga yang taat aturan, beradab, bertanggung jawab, dan memahami hak dan kewajiban secara proporsional. Kemudian secara ekonomi, adalah jelas bahwa pendidikan merupakan "*human capital investment*". Pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang dibentuk melalui proses pendidikan berkorelasi positif bagi peningkatan penghasilan dan kesejahteraan. Karena itulah, perspektif ekonomi menyakini bahwa hanya lewat upaya pendidikan kesejahteraan ekonomi dapat dibangun. Kemudian dari perspektif filosofis, bahwa pendidikan merupakan upaya humanisasi yang sesungguhnya. Melalui pendidikan maka manusia dibentuk, dikonstruksikan dan diarahkan agar menjadi manusia sesungguhnya (*humanized human being*), makhluk rasional yang memiliki dan memahami nilai humanitas yang berlaku secara universal. Demikian pula, dari perspektif agama, pendidikan ditempatkan pada posisi tertinggi karena fungsinya yang membentuk perilaku teratur sesuai ajaran Tuhan yang diimaninya.

Menyadari penting dan strategisnya pendidikan dalam proses dinamika kehidupan manusia, maka para pendiri bangsa kita, telah memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pembangunan pendidikan nasional. Para *founding fathers* bangsa memandang bahwa melalui upaya pendidikan, bangsa kita akan dapat melakukan perubahan ke arah kemajuan. Sikap tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang mempertegas tujuan pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahkan UUD 1945 menyatakan bahwa; 1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, 2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai, serta 3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pertanyaannya adalah pendidikan seperti apa yang mampu *mencerdaskan kehidupan bangsa*? Praksis pendidikan bagaimana yang mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia? Tidak terlalu mudah untuk menjawab persoalan tersebut. Tetapi kajian tentang paradigma pendidikan sebagai landasan pelaksanaan pendidikan barangkali menjadi salah satu solusi untuk menuju praksis pendidikan yang kondusif/ideal.

PROBLEMATIKA MODERNITAS

Secara positif perkembangan global sedikitnya dapat dicirikan ke dalam lima hal (Harahap, 1998). *Pertama*, terjadinya pergeseran dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi, dan informasi; dari keseimbangan kekuatan (*balance of power*) ke arah keseimbangan kepentingan (*balance of interest*). *Kedua*, hubungan antarnegara-bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (*dependency*) ke arah saling bergantung (*interdependency*); hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat bergantung kepada posisi tawar-menawar (*bargaining position*). *Ketiga*, batas-batas geografis hampir tidak lagi menjadi sesuatu yang berarti secara operasional. Kekuatan suatu negara dan komunitas di dalam interaksinya dengan negara dan komunitas lain lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). *Keempat*, persaingan antarnegara lebih diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi. Sehingga setiap negara berkepentingan untuk mendongkrak anggaran dan penyediaan dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan bila tidak ingin tertinggal dengan negara lain. *Kelima*, terciptanya budaya dunia yang cenderung

mekanistik, efisien, dan tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi dianggap tidak menguntungkan.

Sebaliknya, implikasi negatif perkembangan global memunculkan pribadi-pribadi yang miskin spiritual, menjatuhkan manusia dari makhluk spiritual ke lembah material-individualistik; eksistensi Tuhan hanya berdiam di relung pemikiran, diskusi, khutbah-khutbah baik lisan maupun tulisan; dan mengalami frustrasi eksistensial (*existential frustration*) dengan ciri-ciri; hasrat yang berlebihan untuk berkusa (*the will to power*), bersenang-senang mencari kenikmatan (*the will to pleasure*) dengan uang-kerja-seks, dan perasaan hidup tanpa makna, seperti bosan, apatis, dan tak punya tujuan. Ikatan primordial dengan system politik modern cenderung melahirkan nepotisme, birokratisme, dan otoriterisme baru yang akhirnya jatuh kepada krisis multidemensi yang tak kunjung usai sebagaimana melanda Indonesia dewasa ini. Seperti dikatakan Seyyed Hossein Nasr (1975) dalam bukunya *Islam and the Plight of Modern Man*, bahwa manusia modern cenderung mengalami *split personality* dan *split integrity* karena modernisasi global. Lebih dari itu, peran agama digeser menjadi persoalan akhirat yang tidak memiliki keterpautan dengan perkembangan global dan orientasi serta pembangunan masa depan.

Tidak kalah memprihatinkan, di bidang pendidikan pun mengalami disorientasi sebagai akibat dari pengaruh global. Pendidikan dikembangkan atas dasar pemikiran positivisme seperti obyektivitas, empiris, tidak memihak pada pemelajar, berjarak dengan obyek belajar (*detachment*), rasional dan bebas nilai. Yang demikian itu justru menghambat proses pembebasan dan menghilangkan watak dan menumpas benih-benih emansipatoris pada setiap proses pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pada perspektif positivistik merupakan proses fabrikasi dan mekanisasi pendidikan untuk memproduksi keluaran pendidikan yang harus sesuai dengan 'pasar kerja'. Proses pembelajaran yang diselenggarakan juga tidak toleran terhadap segala bentuk '*non positivistic ways of knowing*' yang disebut sebagai tidak ilmiah. Pendidikan menjadi a-historis, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variable dalam model tersebut. Pemelajar harus tunduk pada struktur yang ada dan mencari cara-cara dimana peran, norma, dan nilai-nilai yang dapat diintegrasikan dalam rangka melanggengkan system tersebut. Asumsi yang melandasi pendidikan itu adalah bahwa tidak ada masalah dalam system yang ada, masalahnya terletak pada sikap mental,

pengetahuan dan keterampilan pemelajar belaka, termasuk kreativitas, motivasi, keahlian teknis pemelajar. Oleh karena itu dalam perspektif positivisme, pendidikan lebih dimaksudkan untuk mengembangkan kecerdasan, keterampilan, dan keahlian pemelajar, sementara komitmen, keyakinan, kesadaran terhadap system yang lebih adil dan motivasi untuk menantang struktur sosial yang ada tidak dilakukan, namun lebih sibuk memfokuskan pada bagaimana membuat system yang ada itu dapat bekerja.

Proses pendidikan tidak dilakukan atas dasar analisis struktural tentang lokasi pemihakan. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas terhadap siapa, pendidikan sulit diharapkan menjadi institusi kritis untuk pembebasan dan perubahan sosial. Pendidikan juga perlu melakukan identifikasi issues strategis dan menetapkan visi dan mandat mereka sebagai pendidikan untuk pemberdayaan. Tanpa pemihakan, visi, analisis dan mandat yang jelas, pendidikan tanpa disadari telah menjadi bagian dari '*status quo*' dan ikut melanggengkan ketidakadilan. Bahkan tanpa pemihakan yang jelas, pendidikan hanyalah menjadi alat penjinakan atau alat hegemoni dari system dan ideologi kelompok tertentu.

Sementara itu ada pandangan yang kuat dari pendidik radikal, bahwa pendidikan pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik ataupun terbebas demi melanggengkan system sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pendidikan tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi system dan struktur sosial yang tidak adil seperti system relasi kelas, relasi gender, relasi rasisme ataupun system relasi lainnya. Pandangan semacam ini dikenal dengan teori '*reproduksi*' dalam pendidikan. Disisi lain ada pandangan lain yang berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa pendidikan adalah proses '*produksi*' kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender, maupun kesadaran kritis lainnya. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan merupakan proses membebaskan manusia. Pendirian kelompok ini berangkat dari asumsi, bahwa manusia dalam system dan struktur sosial yang ada pada dasarnya mengalami proses dehumanisasi karena eksploitasi kelas, dimisasi gender maupun karena hegemoni dan dominasi budaya lainnya. Oleh sebab itu pendidikan harus mampu menjadi sarana untuk '*memproduksi*' kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasarat upaya untuk pembebasan.

PARADIGMA KONSERVATIF

Bagi kaum konservatif, ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia menjadi lebih sengsara saja. Dalam bentuknya yang klasik atau awal paradigma konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna di balik itu semua. Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif lama tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengubah kondisi mereka.

Namun pada perjalanan selanjutnya, paradigma konservatif cenderung lebih menyalahkan subyeknya. Bagi kaum konservatif, mereka yang menderita, yakni orang-orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena banyak orang lain yang ternyata dapat bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang ke sekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindarkan konflik dan kontradiksi.

PARADIGMA LIBERAL

Kaum liberal, berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi bagi mereka pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu tugas pendidikan juga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi. Sungguhpun demikian, kaum liberal selalu berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan, dengan jalan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pendidikan dengan usaha reformasi 'kosmetik'. Umumnya yang dilakukan adalah seperti; perlunya membangun kelas dan fasilitas baru, memoderenkan peralatan sekolah dengan pengadaan computer yang lebih canggih dan laboratorium, serta berbagai usaha untuk menyehatkan rasio guru-murid. Selain itu juga berbagai investasi untuk

meningkatkan metodologi pembelajaran dan pelatihan yang lebih efisien dan partisipatif, seperti Quantal Learning, Learning by Doing, Contextual Learning. Usaha peningkatan tersebut terisolasi dengan system dan struktur ketidakadilan kelas dan gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat.

Kaum liberal dan konservatif sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah a-politik, dan *'excellence'* haruslah merupakan target utama pendidikan. Kaum liberal beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Mereka tidak melihat kaitan pendidikan dalam struktur kelas dan dominasi politik dan budaya serta diskriminasi gender di masyarakat luas. Bahkan pendidikan bagi salah satu aliran liberal yakni *structural functionalisme* justru dimaksud sebagai sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat. Pendidikan justru dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik.

Pendekatan liberal inilah yang mendominasi segenap pemikiran tentang pendidikan baik pendidikan formal seperti sekolah, maupun pendidikan non-formal seperti berbagai macam pelatihan. Akar dari pendidikan ini adalah Liberalisme, yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan, serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskriminal demi menjaga stabilitas jangka panjang. Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar pada cita-cita barat tentang individualisme. Ide politik liberalisme sejarahnya berkaitan erat dengan bangkitnya kelas menengah yang diuntungkan oleh kapitalisme. Paradigma ini dipengaruhi oleh filsafat barat tentang model manusia universal yakni model manusia Amerika dan Eropa. Model tipe ideal mereka adalah manusia *'rationalis liberal'*, seperti; **pertama** bahwa semua manusia memiliki potensi sama dalam intelektual, **kedua** baik tatanan alam maupun norma social dapat ditangkap oleh akal, **ketiga** adalah *'individualis'* yakni adanya anggapan bahwa manusia adalah *otomistic* dan otonom (Bay, 1988). Menempatkan individu secara *otomistic*, membawa pada keyakinan bahwa hubungan social sebagai kebetulan, dan masyarakat dianggap tidak stabil karena interest anggotanya yang tidak stabil.

Pengaruh liberal ini kelihatan dalam pendidikan yang mengutamakan prestasi melalui proses persaingan antar siswa. Perangkingan untuk menentukan siswa terbaik,

adalah implikasi dari paham pendidikan ini. Pengaruh pendidikan liberal juga dapat dilihat dalam berbagai pendekatan ‘*andragogy*’ seperti dalam *training management*, dan kewirausahaan. *Achievement motivation training* (AMT) yang diciptakan oleh David McClelland adalah contoh terbaik pendekatan liberal. McClelland berpendapat bahwa akar masalah keterbelakangan dunia ketiga karena mereka tidak memiliki apa yang dinamakan “N Ach”. Oleh karena itu syarat pembangunan bagi rakyat dunia ketiga adalah perlu virus “N Ach” yang membuat individu menjadi agresif dan rasional (McClelland).

PARADIGMA KRITIS/RADIKAL

Pendidikan bagi mereka merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik, ekonomi masyarakat di mana pendidikan berada (Giroux, 1981). Bagi mereka kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Paham ini bertentangan dengan pandangan kaum liberal dimana pendidikan dianggap terlepas dari persoalan kelas dan gender yang ada dalam masyarakat.

Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap, ‘*the dominant ideology*’ ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap system dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju system social yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap obyektif maupun berjarak dengan masyarakat (*detachment*) seperti anjuran positivisme. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap system dominant sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk mencipta system social baru dan lebih adil. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas kritis untuk transformasi social. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah ‘memanusiakan’ kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena system dan struktur yang tidak adil.

Banyak ahli pendidikan yang beranggapan bahwa peletak dasar filosofi paradigma pendidikan kritis ini adalah Paulo Freire, dan terinspirasi oleh pemikir lain

tentang ‘pembebasan’ seperti karya Erich Fromm (*Fear From Freedom* - 1942, *Beyond the Chains of Illusion* – 1962). Begitu juga pemikiran Frantz Fanon (1961) dari Afrika tentang “psikologi bagi kaum tertindas” dalam karyanya yang berjudul *The Wretched of the Earth* juga dianggap sebagai pelopor lahirnya pendidikan kritis. Tetapi bagi penulis, penggagas pertama tentang paradigma pendidikan kritis adalah Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantoro) dengan *Pancadarma Taman Siswa*, yang berprinsip bahwa pendidikan harus menyangkut kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan (M.Numan Somantri, dkk., 1995). Sebab Paulo Freire baru lahir tahun 1912, Fromm gagasannya berkembang tahun 60-an, sementara Fanon juga berkembang tahun 60-an. Ki Hadjar Dewantoro mulai meluncurkan gagasan tentang system pendidikan yang mampu membebaskan dan atau memerdekakan manusia sejak tahun 1913.

BAGAIMANA PROSES PENDIDIKAN KRITIS

Implementasi pendidikan kritis tidak terlepas dari upaya untuk membangun dan atau mengubah kesadaran masyarakat dari kesadaran *magis* dan kesadaran *naïf* menuju kesadaran *kritis*. Kesadaran ‘*magis*’ (*magical consciousness*), yakni suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya, masyarakat miskin tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan system politik dan kebudayaan. Kesadaran *magis* lebih melihat faktor di luar manusia (natural maupun supra natural) sebagai penyebab dan ketidakberdayaan. Dalam dunia pendidikan, jika proses pembelajaran tidak mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah maka proses pembelajaran dalam perspektif Freirean disebut sebagai pendidikan fatalistik. Proses pendidikan model ini tidak memberikan kemampuan analitis, kaitan antara system dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Siswa secara dokmatis menerima ‘kebenaran’ dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami ‘makna’ ideology dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Kesadaran ‘*naïf*’ (*naïval consciousness*), lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini masalah etika, kreativitas, ‘*need for achievement*’ sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena ‘salah’ masyarakat sendiri,

karena mereka malas, tidak memiliki jiwa wirausaha,. Oleh karena itu *man power development* adalah sesuatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan system dan struktur, bahkan system dan struktur yang ada adalah sudah baik dan benar, merupakan faktor *given* dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar siswa dapat masuk beradaptasi dengan system yang sudah benar tersebut.

Kesadaran 'kritis' (*critical consciousness*), lebih melihat aspek system dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan system sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta akibatnya pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan, melatih siswa untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam system dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pendidikan dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan keselamatan agar peserta didik terlibat dalam suatu proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Agar mampu membangun kesadaran kritis maka proses pembelajaran, harus mencerdaskan sekaligus bersifat membebaskan pesertanya untuk menjadi pelaku (subyek) utama, bukan sasaran pelaku (obyek), dari proses tersebut. Ciri-ciri pokok dari pembelajaran yang demikian itu adalah;

Belajar dari realitas atau pengalaman: yang dipelajari bukan "ajaran" (teori, pendapat, kesimpulan, wejangan, nasehat, dsb) dari seseorang, tetapi keadaan nyata masyarakat atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Akibatnya, tidak ada otoritas pengetahuan seseorang lebih tinggi dari yang lainnya. Keabsahan pengetahuan seseorang ditentukan oleh pembuktiannya dalam realitas tindakan atau pengalaman langsung, bukan pada retorika atau "kepintaran omong"nya.

Tidak Mengurai: karena itu tak ada "guru" dan tak ada "siswa yang diguru". Semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan ini adalah "guru sekaligus siswa" pada saat yang bersamaan.

Dialogis: karena tidak ada lagi guru atau siswa, maka proses yang berlangsung bukan lagi proses “mengajar-belajar” yang bersifat satu arah, tetapi proses “komunikasi” dalam berbagai bentuk kegiatan (diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus, wawancara, dsb) dan penggunaan media yang lebih memungkinkan terjadinya dialog kritis antar semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan.

Agar tetap pada asas pendidikan kritis yang menjadi landasan filosofinya, maka panduan proses belajar harus disusun dalam suatu proses yang dikenal sebagai “daur belajar (dari) pengalaman yang distrukturkan” (*structural experience learning cycle*). Proses belajar ini memang sudah teruji sebagai suatu proses belajar yang memenuhi semua tuntutan atau prasarat pendidikan kritis, terutama karena urutan prosesnya memang memungkinkan bagi tiap individu untuk mencapai pemahaman dan kesadaran atas suatu realitas social dengan cara terlibat (partisipasi), secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bagian dari realitas tersebut.

Pengalaman keterlibatan inilah yang memungkinkan setiap individu mampu melakukan;

Rangkai-ulang (Rekonstruksi); yakni mengurai kembali rincian (fakta, unsur-unsur, urutan kejadian, dll) dari realitas tersebut. Pada tahap ini juga bisa disebut proses mengalami; karena proses ini selalu dimulai dengan penggalan pengalaman dengan cara melakukan kegiatan langsung. Dalam proses ini partisipan terlibat dan bertindak dan atau berperilaku mengikuti suatu pola tertentu. Apa yang dilakukan dan dialami adalah mengerjakan, mengamati, melihat dan mengatakan sesuatu. Pengalaman itulah yang pada akhirnya menjadi titik tolak proses belajar selanjutnya.

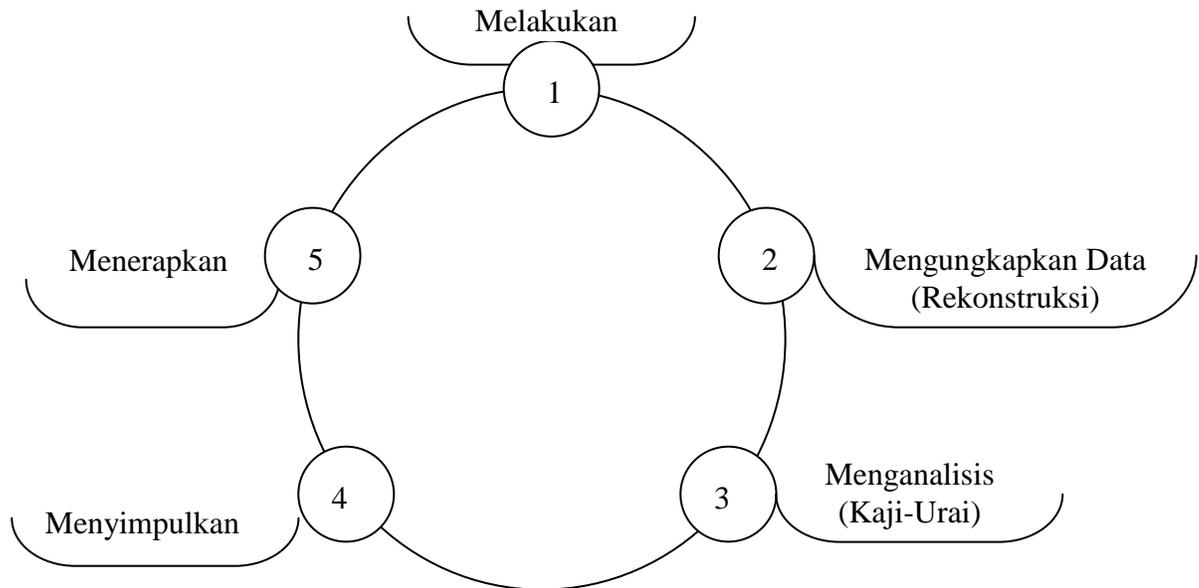
Ungkapan; setelah mengalami, maka tahap berikutnya yang penting yakni proses mengungkapkan dengan cara menyatakan kembali apa yang sudah dialaminya, bagaimana tanggapannya, kesan atas pengalaman tersebut.

Kaji-Urai (Analitis); yakni mengkaji sebab-sebab dan kemajemukan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut (tatanan, aturan-aturan, system yang menjadi akar persoalan).

Kesimpulan; yakni merumuskan makna atau hakekat dari realitas tersebut sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih utuh, berupa prinsip-prinsip, generalisasi dari hasil pengkajian atas pengalaman tersebut. Dengan

menyatakan apa yang dialami dan dipelajari melalui cara seperti itu akan membantu untuk merumuskan, merinci dan memperjelas hal-hal yang telah dipelajari.

Tindakan; tahap akhir dari daur belajar ini adalah memutuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru atas realitas tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan realitas-realitas baru yang juga lebih baik. Proses belajar tersebut dapat divisualisasikan melalui gambar berikut;



PROSES BELAJAR

PENUTUP

Upaya membangun kesadaran kritis melalui pendidikan, dimaksudkan agar pendidikan mampu menciptakan system ekonomi dan sistem politik yang adil dan berpihak pada yang lemah. Agar upaya itu terwujud, paradigma pendidikan *konservatif* dan paradigma pendidikan *liberal* harus ditinggalkan dan beralih pada paradigma pendidikan *kritis*. Paradigma pendidikan kritis ini merupakan sebuah upaya untuk

membangun dan mengubah kesadaran masyarakat dari kesadaran *magis* dan kesadaran *naïf* menuju kesadaran *kritis*.

Bagi kaum *konservatif*, ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu hukum keharusan alami, suatu hal yang mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Kaum *liberal*, berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi bagi mereka pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan keyakinan seperti itu tugas pendidikan juga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi. Jika bagi konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma *kritis* menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik, ekonomi masyarakat di mana pendidikan. Dalam perspektif kritis, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap, ‘*the dominant ideology*’ ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap system dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju system sosial yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Erich Fromm, *Fear From Freedom* (New York: Avon Bokks, 1942)
- Erich Fromm, *Beyond the Chains of Illusion* (New York: Routledge & Keegan, 1962).
- Fakih, Mansour, Roem Topatimasang, dan Toto Rahardjo, *Pendidikan Populer* (Yogyakarta: REaD Book, 2001).
- Freire, P., *Education for Critical Conciousness* (New York: Continuum, 1981).
- Giroux, H.A., *Ideology, Culture and the Process of Schooling* (Philadelphia: Temple University and Falmer Press, 1981).
- Harahap, Syahrin (ed), *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).
- Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- O’neil, Wiliam F., *Educational Ideologies* (California: Goodyear Publising Company, 1981).

Nasr, Seyyed Hossein, *Islam and the Plight of Modern Man* (London: Logman, 1975).

Numan Somantri M., dkk., *Pendidikan dan Prospeknya Terhadap Pembangunan Bangsa dalam PJP II* (Jakarta: ISPI, 1995).